

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap hambatan keberlanjutan Program Baling Bambu di Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama tidak berlanjutnya program ini terletak pada disfungsi birokrasi pelaksana yang tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip ideal sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber. Birokrasi yang seharusnya bersifat rasional, impersonal, dan berbasis aturan justru diwarnai oleh kelemahan dalam pembagian kerja, lemahnya koordinasi, serta pengaruh politik.

1. Tim pelaksana program tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun telah dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota, tim tersebut hanya berperan secara administratif tanpa pelaksanaan teknis yang nyata. Kegiatan program lebih banyak dijalankan oleh pejabat struktural Dinas Sosial yang memiliki beban kerja ganda, sehingga prinsip spesialisasi kerja dan efektivitas yang menjadi dasar birokrasi rasional tidak berjalan.
2. Proses sosialisasi yang sangat terbatas menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan program. Sosialisasi hanya dilakukan dua kali di awal pembentukan, bahkan sebelum memiliki dasar hukum yang sah.
3. Pengaruh dinamika politik lokal menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam menghambat keberlanjutan program. Keterkaitan simbolik antara program dengan figur politik tertentu menurunkan netralitas birokrasi. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan, dukungan administratif terhadap program

berhenti, menunjukkan absennya prinsip impersonalitas dalam pelaksanaan kebijakan publik.

4. Pengawasan pasca penyaluran bantuan tidak berjalan menyeluruh. Pengawasan yang seharusnya memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran masih dilakukan secara sporadis dan tidak memiliki pedoman tertulis. Akibatnya, efektivitas program tidak dapat diukur secara objektif dan keberlanjutan kegiatan tidak dapat dijamin..

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebelumnya, maka terdapat beberapa saran dari penulis yang dapat dipertimbangkan oleh pihak terkait. Saran-saran tersebut diantaranya :

1. Penguatan Struktur Birokrasi Pelaksana. Pemerintah Kota Bukittinggi perlu memperkuat struktur tim pelaksana program agar tidak sekadar bersifat administratif. Penunjukan anggota tim hendaknya didasarkan pada kompetensi dan keahlian profesional, bukan semata jabatan struktural, sehingga setiap personel memiliki peran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Peningkatan Mekanisme Sosialisasi. Sosialisasi program harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah hingga ke tingkat masyarakat penerima manfaat. Hal ini penting untuk memastikan keterbukaan informasi, memperluas jangkauan penerima, dan memperkuat legitimasi sosial program di tingkat akar rumput.
3. Menjamin Netralitas Birokrasi dari Kepentingan Politik. Program sosial harus dipisahkan secara tegas dari kepentingan politik praktis. Pemerintah daerah